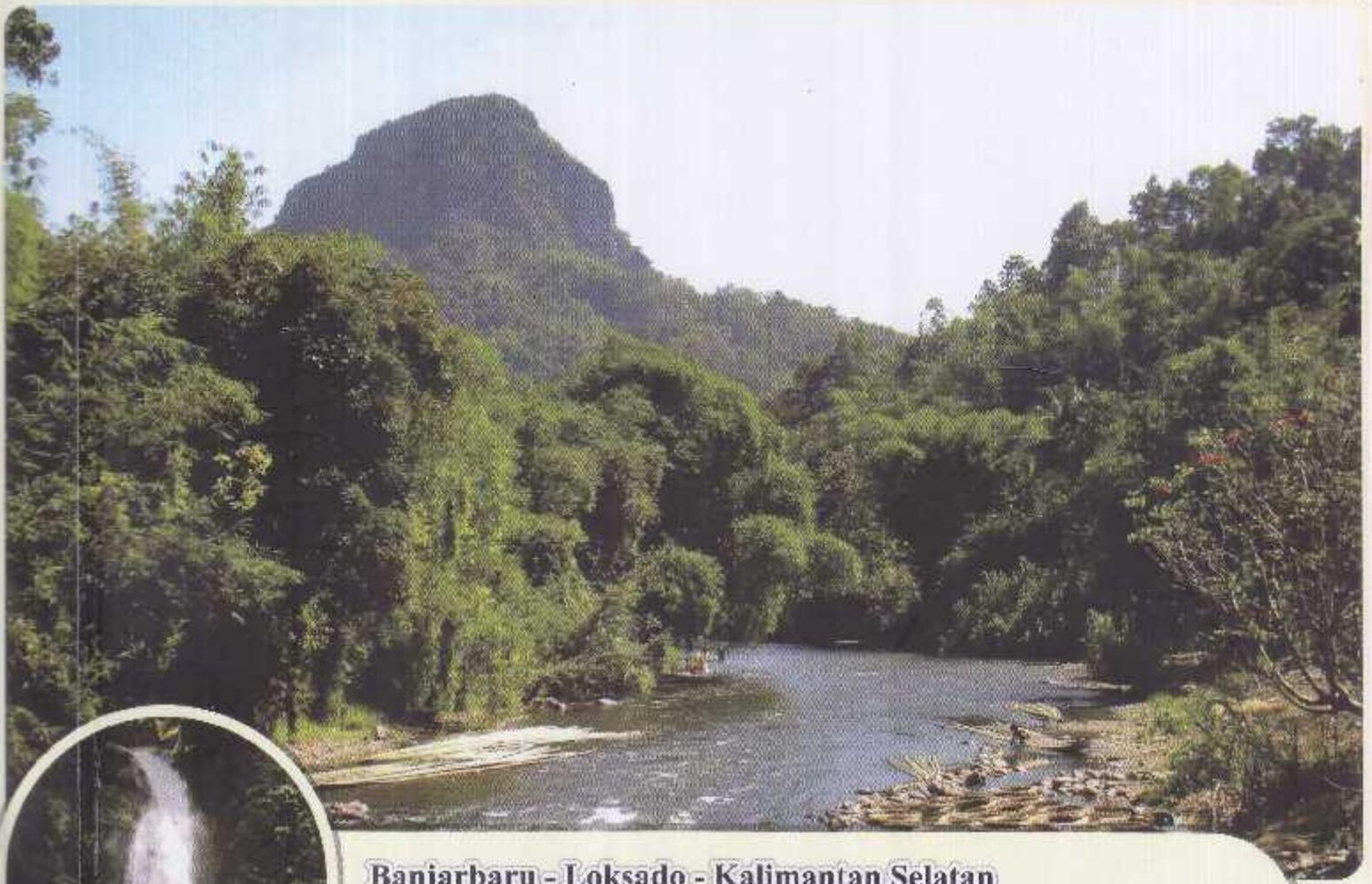


Prosiding

**Seminar Nasional dan Pertemuan
Ilmiah Tahunan ke - 2 KOMHINDO**

**Pengelolaan Hutan Berbasis KPH untuk Keberlanjutan
Produksi, Ekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat**



**Banjarbaru - Loksado - Kalimantan Selatan
08 - 09 Oktober 2016**

Prosiding

**Seminar Nasional dan Pertemuan
Ilmiah Tahunan ke - 2 KOMHINDO**

**Pengelolaan Hutan Berbasis KPH untuk Keberlanjutan
Produksi, Ekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat**

Diterbitkan Oleh :

**LAMBUNG MANGKURAT
UNIVERSITY PRESS**

Bekerjasama dengan



KOMHINDO



FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS LINGSING MANGKURAT



PERKARAS HULU
SUNGGAI SELATAN



**Banjarbaru - Loksado - Kalimantan Selatan
08 - 09 Oktober 2016**

**PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KPH UNTUK KEBERLANJUTAN PRODUKSI,
EKOLOGI DAN SOSIAL EKONOMI
BUDAYA MASYARAKAT**

Prosiding

**Seminar Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahun Ke-2 Komunitas Manajemen Hutan
Indonesia (KOMHINDO)
Banjarbaru, 08 – 09 Oktober 2016**

**PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KPH UNTUK KEBERLANJUTAN PRODUKSI,
EKOLOGI DAN SOSIAL EKONOMI
BUDAYA MASYARAKAT**

Prosiding

**Seminar Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahun Ke-2 Komunitas Manajemen Hutan
Indonesia (KOMHINDO)
Banjarbaru, 08 – 09 Oktober 2016**

Diterbitkan oleh:

Lambung Mangkurat University Press, 2016

d/a Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan Unlam

Jl. H.Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin 70123

Gedung Rektorat Unlam Lt 2

Telp/Faks. 0511-3305195

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang memperbanyak Buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan cara apa pun, baik secara mekanik maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit

IX – 711 h 15,5 x 23 cm

Cetakan pertama, Desember 2016

Sampul dan Lay Out:

Editor:

Dr. Hafizianor, S. Hut, MP

Dr. Yusanto Nugroho, S. Hut, MP

Susilawati, S. Hut, MP

ISBN: 978-602-6483-08-9

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LAPORAN KETUA PANITIA.....	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
I. DAFTAR PEMAKALAH UMUM SEMINAR NASIONAL KOMHINDO 2016 TAHUN KE-2	1
II. FULL PAPER KOMISI.....	14
A. KOMISI A : ASPEK REGULASI, KEBIJAKAN, LAND TENURIAL DAN MANAJEMEN HUTAN.....	14
1. Ketahanan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di Sub-Sub DAS Lengkesse, Sub DAS Lengkesse DAS Jeneberang)	14
2. Skenario Luas Lahan Berhutan Untuk Optimalisasi Fungsi Ekonomi dan Ekologi Daerah Hulu DAS Tondano Sulawesi Utara	22
3. Konsistensi Regulasi Dalam Bidang Kehutanan Implikasinya Terhadap Tindak Pidana Kehutanan	32
4. Strategi Magement Regime (Rejim Pengelolaan) Dalam Pengelolaan Hutan Jati Bersama Masyarakat di Resort Polisi Hutan (RPH) Madampi Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Muna Tengah	40
5. Dampak Kebijakan Sertifikasi Terhadap Perkembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Pacitan.....	49
6. Prospek Ekonomi Pembangunan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Sebagai Entitas Bisnis Melalui Strategi Diversifikasi Produk dan Jasa (Teori, Implementasi, Usulan Kebijakan)	58
7. Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Mangrove Center Graha Indah (MCGI) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	67
8. Dinamika Menuju Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman “Sebuah Harapan dan Tantangan.....	82
9. Strategi Pengelolaan Jasa Lingkungan Wisata Alam Arung Jeram Di Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Telake Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	96
10. Strategi Pengembangan KPHP Bongon Menuju Pemanfaatan Hutan Lestari.....	104
11. Penataan Batas Kawasan Hutan di KPHP Model Banjar	113

STRATEGI PENGEMBANGAN KPHP BONGAN MENUJU PEMANFAATAN HUTAN LESTARI

Marjenah¹⁾, Ali Suhardiman¹⁾, Eddy Rieswanto²⁾, Sumaryono¹⁾, Hari Siswanto¹⁾, Zainul Arifin¹⁾,
Ariyanto¹⁾

1) Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

2) Kepala KPHP Bongan Kalimantan Timur

Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

Kampus Gunung Kelua Jl. Ki Hajar Dewantara P.O. Box 1013

Telp. (0541) 735 089; 749 068 Fax. (0541) 735 379 Samarinda 75116

e-mail : marjenah_umar@yahoo.com

ABSTRAK

Strategi adalah cara yang meliputi seni dan pengetahuan yang diterapkan dalam mencapai tujuan. Pengelolaan hutan lestari (PHL) adalah pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari bertujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. Manajemen hutan lestari merupakan konsep pengelolaan hutan lestari yang menjalankan fungsi ekologis dan fungsi ekonomis hutan dengan pelibatan masyarakat di dalamnya. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (PHL) maka Pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu membagi habis seluruh kawasan hutan di Indonesia ke dalam sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Penetapan lokasi kegiatan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan pertimbangan aksesibilitas menuju lokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek KPHP Bongan menjadi dasar alokasi hutan untuk pengelolaan tata hutan. Dengan demikian konflik dengan masyarakat dan pihak lain dapat dihindari.

Kata Kunci: strategi, pengelolaan hutan lestari, kesatuan pengelolaan hutan, tata hutan

1. Latar Belakang

Strategi adalah cara yang meliputi seni dan pengetahuan yang diterapkan dalam mencapai tujuan. Kata strategi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mempunyai pengertian adalah *langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi*. Visi, misi, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk, dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis semua acuan tersebut terdapat di dalamnya.

Strategi merupakan penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi, penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya, penting untuk melaksanakan sasaran ini. Strategi merupakan sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari suatu kegiatan. Pengertian strategi lebih tajam ketika menegaskan bahwa strategi itu sesungguhnya adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut.

Beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam rangka pengelolaan usaha di bidang kehutanan adalah:

- 1) Mendorong dan mengimplementasikan dengan maksimal sistem pemantauan (misal dalam kerangka Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) dan Verifikasi Kayu (SVLK);
- 2) Mengintensifkan pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi dalam kawasan Hutan Produksi untuk dijadikan Hutan Tanaman Industri/Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan pemilihan jenis pohon yang tepat;
- 3) Merintis segera terbentuknya KPH dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang Kehutanan agar lebih produktif dan tidak menjadi beban daerah;
- 4) Melakukan pembinaan secara intensif serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan terhadap pelaku-pelaku kehutanan dan industri kehutanan skala kecil guna melengkapi struktur perusahaan hutan di daerah secara efektif.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (PHL) maka Pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu membagi habis seluruh kawasan hutan di Indonesia ke dalam sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan, menjabarkan kebijakan Kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya, dan membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan (Anonim, 2012^a).

Dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri Kehutanan telah menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.

Wilayah KPHP Bongan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 674/Menhut-II/2011 seluas 421.743 Ha (Unit XXXII), kemudian direvisi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 seluas 335.238,99 Ha. Wilayah kerja KPHP Bongan meliputi 3 Kabupaten yaitu sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagian wilayah Kabupaten Paser dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Tata hutan adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasikan areal kerja KPH sesuai dengan karakteristik KPH dan hak-hak masyarakat sehingga perencanaan dan kegiatan pengelolaan KPH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan. Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (Anonim, 2012^b).

Strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola hutan, dan penataan kelembagaan. Pengembangan pengelolaan hutan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan.

Penyelenggaraan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum pemanfaatan hutan dapat diselenggarakan melalui kegiatan: (1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa lingkungan, (3) pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau (4) pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk pemanfaatan hutan di kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi, seluruh jenis pemanfaatan tersebut dapat dilakukan.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendapatkan strategi pengembangan pengelolaan hutan yang termasuk dalam ruang lingkup KPHP Bongan untuk pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khusus untuk masyarakat yang berada di sekitar hutan.

2. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah KPHP Bongan yang meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagian wilayah Kabupaten Paser dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian survei yang dikombinasikan dengan pendekatan studi literatur. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder terkait. Data primer terkait karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi

usaha diperoleh langsung dari KPH. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang tersedia pada instansi pemerintah pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa maupun pihak swasta. Data sekunder meliputi: kondisi umum wilayah KPHP Bongan, kondisi sosial ekonomi, dan peraturan pendukung KPHP. Data sekunder diperoleh dari beberapa lembaga di Kementerian Kehutanan yang terkait dengan pembangunan KPH seperti Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan; sumber lain yang mendukung berupa laporan, peta, peraturan perundangan, dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Analisis Data

Data dianalisis secara *Qualitative – Descriptive Analysis* dan *Quantitative – Descriptive Analysis*. Untuk merumuskan strategi pengembangan KPH dilakukan penyederhanaan-penyederhanaan realitas lapangan yang kompleks dengan menggunakan pendekatan untuk menetapkan strategi pengembangan yang akan dilakukan.

Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai kondisi dan pandangan terhadap kelembagaan KPHP. Analisis ini juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi biofisik dan sosial ekonomi KPHP

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Letak dan Luas Wilayah KPHP Bongan

Luas wilayah UPTD KPHP Bongan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 seluas 421.743 Ha masuk pada unit XXXII, kemudian terjadi perubahan terhadap luas wilayah kerja UPTD KPHP Bongan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 seluas 335.238,99 Ha. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Wilayah Kerja KPHP Bongan

No.	Tipe Hutan	Luas (ha)
1.	Hutan Lindung	31.952,24
2.	Hutan Produksi Tetap	165.948,20
3.	Hutan Produksi Terbatas	135.229,65
4.	Hutan Konversi	2.108,90
Jumlah		335.238,99

UPTD KPHP Bongan dibagi menjadi 3 resort, yaitu seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Luas Wilayah Kerja UPTD KPHP Bongan Berdasarkan Pembagian Resort

Resort	Kabupaten	Luas (ha)
1	Paser	104.013,65
2	Penajam Paser Utara (PPU)	55.702,97
3	Kutai Barat	175.522,37
Jumlah		335.238,99

Kawasan KPHP Bongan di Provinsi Kalimantan Timur secara geografis terletak pada posisi antara 0° 39' 48.16" LS - 1° 9' 9.72" LS dan 115° 40' 0.74" BT - 116° 9' 9.98" BT. Berdasarkan letak administrasi pemerintahan areal KPHP Bongan berada pada Kabupaten Paser yang berada di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di Kecamatan Babulu, Waru dan Penajam, Kabupaten Kutai Barat berada di Kecamatan Bentian Besar, Siluq Qurai dan Bongan.

Selanjutnya, dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 - 2019, salah satu sasaran yang ditetapkan yaitu beroperasinya 629 KPH yang terdiri 347 KPH Produksi dan 182 KPH Lindung dan 150 KPH Konservasi. Prasyarat suatu KPH dinyatakan telah beroperasi yaitu terdapat kelembagaan, terdapat sarana dan prasarana operasional perkantoran serta tersusunnya rencana pengelolaan wilayah pada KPH tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2016 BPKH Wilayah IV Samarinda memfasilitasi penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan, salah satunya adalah KPHP Bongan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di KPHP Bongan

Untuk memenuhi salah satu prasyarat untuk beroperasinya sebuah KPH adalah terdapatnya kelembagaan. KPHP Bongan merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011, kemudian direvisi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : **SK. 718/Menhut-II/2014**. Sampai saat ini (2016) kondisi SDM yang ada di KPHP Bongan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Kondisi SDM pada KPHP Bongan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status kepegawaian	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	54
2	Tenaga Bhakti Rimbawan	5
3	Tenaga Kontrak	3
Jumlah		62

Dari jumlah SDM yang tersedia dibandingkan dengan luasan areal kelola yang akan dibagi menjadi 3 resort, maka seyogyanya harus ada penambahan SDM untuk pengelolaan KPHP Bongan. Terkait dengan keterbatasan SDM, Kementerian Kehutanan telah berupaya membantu KPH berupa bantuan tenaga teknis dari lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) sebanyak 2-5 orang setiap KPH. Fasilitas ini bagi sebagian KPH merupakan sebuah bantuan yang berarti dalam proses persiapan KPH. Salah satu kontribusi dari mereka dapat membantu pekerjaan penataan hutan khususnya di lapangan. Keberadaan mereka yang memiliki keterampilan teknis lebih berarti (Budiningih, dkk., 2015).

Selain kelembagaan, sarana dan prasarana operasional perkantoran juga merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki

oleh UPTD Bongan adalah 2 buah bangunan berupa gedung kantor, yaitu kantor Utama dan Kantor Resort 1 (Kabupaten Paser). Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki KPHP Bongan ada 3 unit, yaitu 1 kendaraan dinas untuk Ka. UPTD KPHP dan 2 unit untuk operasional lapangan. Kendaraan dinas roda 2 ada 4 unit semuanya untuk keperluan operasional lapangan. Peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia di KPHP Bongan adalah komputer PC, Laptop, Printer, Air Condition/AC), Meja/kursi kera, lemari arsip, mesik tik manual, Infocus.

Sarana dan prasarana yang ada dipandang masih kurang memadai untuk sebuah KPHP yang memiliki 3 Resort, oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan penambahan fasilitas (sarana dan prasarana). Misalnya, penambahan gedung kantor untuk Resort 2 (PPU) dan Resort 3 (Kabupaten Kutai Barat). Dukungan listrik, air dan jaringan komunikasi termasuk komputer dan internet yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan sehari-hari.

Rencana pengelolaan wilayah merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi untuk beroperasinya sebuah KPH. Oleh karena itu, pada tahun 2016 BPKH Wilayah IV Samarinda memfasilitasi penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan.

Potensi Wilayah KPHP Bongan

1. Penutupan Vegetasi

Wilayah KPH Bongan sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Produksi (IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT) dengan tutupan berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman. sebagian wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi memiliki tutupan vegetasi berupa semak belukar bekas perladangan masyarakat, perkebunan dan pertanian lahan kering.

Gambaran yang lebih detail terkait dengan tipe tutupan hutan ataupun vegetasi serta penggunaan lahan lainnya berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Landsat liputan 2015 di lokasi KPH Bongan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Gambaran Detail Tentang Tipe Tutupan Lahan di Wilayah Kelola KPHP Bongan

No.	Tutupan Lahan (<i>Landcover</i>)	Luas (Ha)	%
I.	Hutan :		
1.	Hutan Tanaman	1.746	0,52
2.	Hutan lahan kering sekunder	274.288	81,70
	Jumlah hutan (I)	276.035	82,22
II.	Non Hutan :		
1.	Lahan Terbuka	8.755	2,61
2.	Perkebunan	3.960	1,18
3.	Permukiman	8	0,00
5.	Pertanian Lahan Kering	3.960	1,18
6.	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	851	0,25
9.	Semak Belukar	46.009	13,70
	Jumlah Non Hutan (II)	59.701	17,78

No.	Tutupan Lahan (<i>Landcover</i>)	Luas (Ha)	%
	Jumlah besar	335.736	100.00

Sumber : Peta Tutupan Lahan Tahun 2015, BPKH

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4, tutupan lahan wilayah KPHP Bongan sebagian besar adalah hutan lahan kering sekunder yaitu 81,7%. Sedangkan sisanya merupakan hutan tanaman dan areal bukan hutan yang terdiri dari semak belukar, permukiman, perkebunan, pertanian dan tanah terbuka.

2. Potensi Hasil Hutan Kayu

Sebagaimana dikemukakan bahwa 82,22% Wilayah KPHP Bongan merupakan areal berhutan yang terdiri dari 0,52% hutan tanaman dan 81,7% hutan sekunder. Ini menggambarkan potensi kayu hutan alam yang ada di wilayah KPHP Bongan masih tinggi. Hutan sekunder pada umumnya berada pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan produksi yang merupakan areal yang dibebani izin Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (IUPHHK-HA). Sehingga potensi hutan alam pada KPHP Bongan masih tinggi.

Pada kegiatan Inventarisasi Hutan Pada KPHP Bongan dilakukan strata penutupan lahan hanya hutan lahan kering sekunder.

Tabel 5. Volume per Hektar Berdasarkan Kelas diameter pada Strata Penutupan Lahan Kering Sekunder

Strata	20 – 29		30 - 39		40 – 49		50 Up		Total N	Total V
	N	V	N	V	N	V	N	V		
Hs	55	31,86	41	51,47	25	54,87	28	185,28	149	323,48

Sumber Data : *Data Primer (diolah), 2015*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata volume per hektar pada hutan lahan kering sekunder adalah sebagai berikut:

- Pohon yang berdiameter 20-29 cm adalah 31,86 m³/Ha (N= 55 btg/ha)
- Pohon yang berdiameter 30-39 cm adalah 51,47m³/ha (N= 41 btg/ha)
- Pohon yang berdiameter 40-49 cm adalah 54,87 m³/ha (N= 25 btg/ha)
- Pohon yang berdiameter ≥ 50 cm adalah 185,28 m³/ha (N= 28 btg/ha)
- Pohon yang berdiameter ≥20 cm adalah 323,48 m³/ha (N=149 btg/ha)

Berdasarkan data hasil inventarisasi hutan, pada KPHP Bongan dijumpai setidaknya 50 jenis pohon. Potensi rata-rata pada hutan lahan kering sekunder (Hs) dengan diameter 20 cm up sebesar 323,48 m³/Ha dengan jumlah batang 149 batang/ha.

Berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat Liputan 2015, kondisi penutupan lahan pada wilayah KPHP Bongan seluas 81,7% didominasi oleh hutan lahan kering sekunder yaitu seluas 274.288 Ha. Dengan demikian dapat diduga nilai potensi pada hutan lahan kering sekunder pada KPHP Bongan adalah sebesar 88.726.682,24 m³

3. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Di wilayah KPHP Bongan saat ini belum dilakukan inventarisasi potensi secara menyeluruh terhadap HHBK. Akan tetapi berdasarkan hasil survey biogeofisik dan sosial ekonomi di wilayah KPHP Bongan masih dijumpai pemanfaatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, maka dapat digambarkan keberadaan HHBK meliputi: beberapa jenis rotan yang tumbuh di wilayah KPHP Bongan antara lain Rotan Sega (*Calamus Caesius*) dan Rotan Semambu (*Calamus sp*) dan juga terdapat beberapa tumbuhan obat seperti Akar Kuning (*Fibraurea Chloroleuca*) dan Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia*) yang digunakan sebagai obat tradisional. Pohon buah-buahan seperti Kerantungan (*Durio, sp*), dan Durian (*Durio, sp*). Dengan masih adanya hutan alam yang luas, maka potensi HHBK juga masih banyak.

Sampai saat ini belum ada pengelolaan HHBK dalam rangka tujuan komersial yang dikemas dalam bentuk usaha kerajinan seperti industri rumah tangga (*home industry*). Dengan demikian masih diperlukan inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan usaha kerajinan pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah KPHP Bongan.

Strategi Pengembangan KPHP Bongan

Strategi pembangunan dan kegiatan pengelolaan KPH dapat dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan pengelolaan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengelolaan hutan (Supratman, 2007). Berdasarkan kepada tujuan pengelolaan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengelolaan KPH, untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khusus untuk masyarakat yang berada di sekitar hutan, maka dapat dirumuskan strategi pengembangan dan kegiatan-kegiatan pengelolaan KPHP Bongan seperti disajikan pada Tabel 6.em

Tabel 6. Strategi Pengembangan dan Beberapa Kegiatan Pengelolaan KPHP

No.	Strategi pengembangan	Kegiatan Pengelolaan
1.	Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tenaga teknis untuk pekerjaan penataan di lapangan.
2.	Peningkatan pelayanan publik dan usaha Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur fisik dan sosial yang mendukung perkembangan unit usaha kehutanan dan industri kehutanan
3.	Penguatan Kelembagaan Usaha Kehutanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan struktur, sistem kemitraan antara petani dan para stake holder berbasis agroforestri. • Membangun kelompok usaha masyarakat (kelompok tani hutan), koperasi, dll. • Pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha kehutanan mulai dari peran sebagai pekerja, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. • Membangun sistem kelembagaan keuangan mikro (seperti BLU)

4.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) • Pembangunan Kebun Energi (untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa)
5.	Penguatan Status Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan Pemanfaatan hasil hutan • Penataan unit usaha sesuai potensi dan fungsi setiap tapak kawasan hutan
6.	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan potensi wisata alam dan promosi jasa lingkungan untuk objek wisata • Membangun kemitraan antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan wisata • Pengembangan komoditas HHBK seperti lebah madu, gaharu, sarang burung walet, buah-buahan, getah karet, damar, kayu putih, jamur, bambu, tumbuhan obat, dll.

nfaatan Kawasan Hutanirektorat Wilayah Pengelolaan

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Untuk mempercepat pelaksanaan rencana kegiatan KPH, beberapa hal yang dapat dikemukakan:

- a) Strategi pengembangan KPHP Bongan adalah meningkatkan usaha kehutanan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.
- b) Memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang kompatibel dan berkesinambungan.
- c) Penguatan kelembagaan usaha kehutanan masyarakat.

Saran

Perlu adanya kegiatan yang terintegrasi antara KPH, instansi terkait (misalnya perkebunan), masyarakat, dan akademisi, untuk mempercepat pelaksanaan rencana KPH.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2012^a. Kesatuan Pengelolaan Hutan & Hak Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Working Group on Forest-Land Tenure. Bogor.
- Anonim, 2012^b. Peraturan Terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Jakarta.
- Anonim, 2016. Laporan Hasil Inventarisasi Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan Provinsi Kalimantan Timur. Dikeluarkan dalam rangka kegiatan daftar isian Anggaran DIPA Tahun 2016. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda. Samarinda.
- Budiningsih, K., S. Ekawati., Gamin, Sylviani, E. Y. Suryandari, dan F. Salaka. 2015. Tipologi dan Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia.
- Supratman, 2007. Desain Model Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Perennial 5(1): 36 – 44. utanan